



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 46 TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2022

Sarilamak, September 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang Telah Memberikan kekuatan dan petunjuk- Nya sehingga telah disusun Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2022 memuat tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, yang dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 sehingga bisa mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah, semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Sarilamak, September 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	II-31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-49
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d Bulan Juni Tahun 2022
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
- Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
- Tabel 3.1 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2022.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPd Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPd.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2022.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 02 September 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak

pada tanggal 02 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA**

ERI FORTUNA,SH

NIP.195601041993031006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 46

NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2022
HAL : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH NOMOR 28
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTATAHUN 2022 KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi "Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diharapkan seluruh kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen

perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2022.
 - Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat untuk detail penyusunannya
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2022.

Pada awal bulan Desember 2020 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Renja Inspektorat oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2019, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2020.
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat mencakup analisis gambaran pelayanan Inspektorat dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun 2022;
 - c. Tujuan dan sasaran Inspektorat;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat; dan
 - e. Penutup.
4. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup :
 - 1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan usulan program ,kegiatan dan sub kegiatan;

- 2) Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Penyelarasan kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 4) Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 5) Penetapan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi;

5. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Inspektorat dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum dilaksanakan di Bapelitbang.

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program ,kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

6. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat merupakan proses penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat disajikan dengan sistematis yang sama dengan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat

7. Penetapan

Dalam hal penetapan Perubahan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Perubahan Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022;
16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/670/VI/Bapeliitbang-LK/2002 Tanggal 01 Juli 2022 hal Permintaan data Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pengentrian ke dalam Aplikasi SIPD Kemendagri;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan Perubahan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.
2. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Perubahan Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap Rancangan RKPD dan penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat dan Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Bab ini berisikan uraian tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Untuk Tahun 2022

Bab IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam

menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikerahkan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tabel berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan pencapaian renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2022 dapat diketahui seperti diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Formulir E-81)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d Bulan Juni Tahun 2022

Nama SKPD : Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
					Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					6	7	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6 01	INSPEKTORAT DAERAH									
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase ketepatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	25,00	50,00	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	85%	9 dokumen	50,00	

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dari Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022				
						Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
6	01	01	01	01	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2028	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kuisarah Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	11=(10/4)	
6	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	10=(7+9) 2 dokumen	50,00
6	01	01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	50,00
6	01	01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	50,00
6	01	01	04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	50,00
6	01	01	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	50,00

Kode	1	2	3	4	5	6	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
							Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.01	06	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
6 01 01 2.01	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	4 laporan 1 dokumen	4 laporan 1 dokumen	100,00%	1 laporan	5 dokumen	50,00
6 01 01 2.02	01	01	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	100%	100%	100,00%	100%	23,75	50,00
6 01 01 2.02	01	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	44 orang	44 orang	100,00%	61 orang	60 orang	50,00
6 01 01 2.02	03	01	01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1000 dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	100,00%	-	1000 dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Inspektorat	1 dokumen	1 dokumen	7	1 dokumen	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00	
6 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 berkas	1 berkas	1 berkas	100,00%	1 dokumen	50,00	
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Inspektorat	16 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100,00%	18 laporan	50,00	
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat	2 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2 laporan	50,00	

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase terfibr administrasi kepegawalan perangkat daerah	95%	100%	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
6 01 01 2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100,00%	120 stel	120 stel	50,00
6 01 01 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	46 orang	46 orang	46 orang	100,00%	60 orang	200 orang	50,00
6 01 01 2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100,00%	100 orang	200 orang	50,00
6 01 01 2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00%	60 orang	60 orang	50,00

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah	95%	100%	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
6 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	6 paket	6 paket	100,00%	13 jenis	23,75	50,00	
6 01 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 jenis	3 paket	3 paket	100,00%	7 jenis	30 jenis	50,00	
6 01 01 2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	13 jenis 12 bulan	13 jenis 12 bulan	100,00%	25 jenis	25 jenis	50,00	
6 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	30 jenis	30 jenis	100,00%	5 paket	35 jenis	50,00	

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.06 05	Urusan/Bidang, Ujuran Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Kelembah Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis	6 jenis	75,00%	6 jenis	6 jenis	100,00%	8 jenis 84010 lembar	10=(7+9) 8 jenis	11=(10/4) 50,00
6 01 01 2.06 08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 judul	1100 eksemplar	100,00%	1100 eksemplar	1100 eksemplar	100,00%	50 eksemplar	50 judul	50,00
6 01 01 2.06 09	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3000 porsl	1610 orang	100,00%	1610 orang	1610 orang	100,00%	200 orang	3000 porsi	50,00
6 01 01 2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 OH	50 laporan	100,00%	50 laporan	50 laporan	100,00%	100 laporan	200 OH	50,00
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	90%	100,00%	90%	90%	100,00%	100%	23,75	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01	2.07	01	01	01	01	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)
6 01 01	2.07	01	01	01	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85%	5 unit	5 unit	100,00%	10=(7+9)
6 01 01	2.07	05	05	05	05	Pengadaan Mebel	2 unit	1 paket	1 paket	100,00%	11=(10/4)
6 01 01	2.07	09	09	09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 jenis	-	-	100,00%	50,00
6 01 01	2.08	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	50,00
6 01 01	2.08	01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 lembar	1850 lembar	1850 lembar	100,00%	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.08 02	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	12 paket rekening 1500 meter kubik 3600 KWH	12 paket rekening 1500 meter kubik 3600 KWH	100,00%	9	12 paket rekening 1500 meter kubik 3600 KWH	10=(7+9) 12 bulan	11=(10/4) 50,00
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	4 orang	4 orang	100,00%	6 orang	6 orang	12 bulan	50,00
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondusif baik	Persentase barang milik daerah yang kondusif baik	34 unit	34 unit	34 unit	100,00%	100%	100%	34 unit	50,00
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	45 unit	40 unit	40 unit	100,00%	50 unit 45 unit 5 unit	50 unit 45 unit 5 unit	45 unit	50,00
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 paket	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	1 paket	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 kegiatan	3 paket	3 paket	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
6 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	82%	81%	81%	81%	100,00%	82%	20,50	50,00
6 01 02 2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya pengawasan Internal	80%	80%	80%	80%	100,00%	80%	20,00	50,00
6 01 02 2.01 01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	152 laporan	4 laporan	50,00
6 01 02 2.01 02	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100,00%	45 laporan	12 laporan	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Tingkat dan Realisasi Kinerja Program dari Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022		
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	115 laporan	8=(7/6) 100,00%	9 43 laporan2 laporan	10=(7+9) 25 laporan	11=(10/4) 50,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	25 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	25 laporan	50,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	45 laporan	20 laporan	100,00%	20 laporan	45 laporan	50,00
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	1 kegiatan	1 kegiatan	50,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	1 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	80% 80%	1 kegiatan	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 02	2.02	Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	6	7	95%	95%	9	10=(7+9) 23,75	11=(10/4) 50,00
6 01 02	2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	1 laporan	1 laporan	50,00
6 01 02	2.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100,00%	100,00%	12 laporan	15 laporan	50,00
6 01 03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	100,00%	100,00%	level 3	level 3	50,00
6 01 03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	95%	95%	95%	100,00%	100,00%	95%	23,75	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01	03	2.01	01	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021	Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi SPIP	1 kegiatan	43 OPD	43 OPD	9	10=(7+9) 1 kegiatan	11=(10/4) 50,00
6 01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen penningkatan Kapabilitas AP/PP	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 kegiatan	50,00
6 01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	95%	95%	95%	23,75	50,00
6 01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50,00
6 01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	50,00

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2022	
						Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 03 2.02 03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7	8=(7/6)	1 kegiatan	1 kegiatan	50,00
6 01 03 2.02 04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	1 kegiatan	1 kegiatan	50,00

A. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 2 dokumendengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Inspektorat yaitu Dokumen Renstra dan Renja Inspektorat.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumendengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumendengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2022.

e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun 2022.

f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 5 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 1 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 61 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 61 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah pembayarannya Gaji ASN Inspektorat Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumendengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumendengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Inspektorat Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaandengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2022.

- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dengan target 18 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 18 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2022.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 120 stel. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 120 stel dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan untuk pegawai Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 60 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 60 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksana bagi pegawai Inspektorat Tahun 2022.

c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 100 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 100 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.

d) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 60 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 60 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.

e) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 60 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 60 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 13 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 13 jenis

dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%. keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Tahun 2022.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 7 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 7 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Tahun 2022.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target 25 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 25 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Inspektorat Tahun 2022.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 5 paket. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 5 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor Inspektorat Tahun 2022.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target 8 jenis dan 84010 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 8 jenis dan 84010 lembar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan di Inspektorat Tahun 2022.

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan target 50 eksemplar. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 50 eksemplar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan di Inspektorat Tahun 2022.

g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target 200 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 200 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tamu Inspektorat Tahun 2022.

h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 100 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 100 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat Tahun 2022.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target 10 unit. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 10 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Inspektorat Tahun 2022.

b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 6 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 6 jenis

dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Mebel di Inspektorat Tahun 2022.

c) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Gedung Aula Inspektorat dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Aula di Inspektorat Tahun 2022.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 900 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 900 lembar, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Tahun 2022.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Tahun 2022.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 6 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 6 orang, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya

kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Tahun 2022.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 50 unit, 45 unit, dan 5 unit. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 50 unit, 45 unit, dan 5 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 152 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 152 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 45 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 45 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja dengan target 43 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 43 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja OPD di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan dengan target 1 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - e) Sub Kegiatan Pengawasan Desa. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa dengan target
-

20 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 20 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal Tahun 2022.

g) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dengan target 80% dan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan target 80%. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 80% dan 80%, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2022.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah dengan target 1 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

b) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan

dengan tujuan tertentu yang terbit dengan target 12 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 12 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi SPIP dengan target 100 orang. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 100 orang, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 dokumen, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%,

keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 50,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas di

lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/06)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	-	-	81	82	83	84			83	84	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)											
	a. Eksternal			81,50	82,00	82,50	83,00			82,50	83,00	
	b. Internal			83,00	83,50	84,00	84,50			84,00	84,50	
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)			80	83	85	87			85	87	
4	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			Level 3	Level 3	
5	Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)			40	45	50	55			50	55	
6	Level Kapabilitas APIP(level)			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			Level 3	Level 3	

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Nilai Inspektorat (nilai) AKIP			75	77	79	80			79	80	
8	Nilai Inspektorat (nilai) IRB			30	31	32	33			32	33	
9	Nilai Inspektorat (nilai) IKM			85,98	87,98	89,97	91,97			89,97	91,97	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terselenggaranya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup

perencanaan sampai dengan evaluasi;

7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
8. Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai OPD Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai

rumusan yang sudah tertuang dalam RancanganRKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RancanganRKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	INSPEKTORAT DAERAH				15.214.176.549							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.082.381.349	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.694.445.261		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	115.183.700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	92.816.100		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	31.751.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	28.836.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	10.290.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	9.592.600	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.638.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.305.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10.845.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.320.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.492.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.387.500	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	0	5 dokumen	10.691.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	0	5 dokumen		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	31.375.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	31.375.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	100%	6.414.546.149	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	100%	7.255.993.461	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang	6.366.585.849	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang	7.249.567.061	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0%	8.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0%	-	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	0	0 dokumen	5.265.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	0	0 dokumen	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	6.426.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	6.426.400	
5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	18.226.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	0	0 laporan	5.892.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	0	0 laporan	-	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	0	0 laporan	3.900.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	0	0 laporan	-	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	2.118.346.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.029.807.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 stel	74.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 stel	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	1.190.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	816.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	272.675.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	245.745.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	580.921.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	168.062.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah	100%	676.360.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah	100%	543.716.500	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	13 jenis	10.789.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	13 jenis	10.789.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis	234.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 jenis	119.875.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	27.439.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	20.319.200	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	70.693.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	60.112.300	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis 84010 lembar	43.775.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis 84010 lembar	52.205.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 eksemplar	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	50 eksemplar	2.000.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 orang	77.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 orang	55.150.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	209.314.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	223.266.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.111.930.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	115.855.000	
1	Pengadaan Perkandangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	888.700.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit		
2	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 jenis	135.730.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 jenis	115.855.000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Gedung Aula Inspektorat	1 unit	1.087.500.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Gedung Aula Inspektorat	1 unit		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	248.995.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	176.390.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 lembar	6.680.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 lembar	5.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 paket rekening 1500 meter kubik	63.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 paket rekening 1500 meter kubik	63.750.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 orang	178.565.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3600 KWH 6 orang	107.640.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	100%	397.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	100%	240.080.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 unit 45 unit 5 unit	300.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 unit 45 unit 5 unit	186.190.000	
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	74.400.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	37.200.000	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 kegiatan	22.050.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 kegiatan	16.690.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	82%	2.315.446.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	82%	2.502.945.000	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	80%	1.829.716.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	80%	2.140.155.000	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	152 laporan	318.100.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	152 laporan	868.110.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45 laporan	340.770.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45 laporan	506.950.000	
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	43 laporan 2 laporan	415.790.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	43 laporan 2 laporan	138.300.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu, Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	26.880.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	24.680.000	
5	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	20 laporan	214.825.000	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	20 laporan	327.300.000	
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbenruk	1 kegiatan	94.482.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbenruk	1 kegiatan	-	
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Inspektorat	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	80% 80%	418.859.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Inspektorat	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	80% 80%	274.815.000	
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	485.730.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	362.790.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	1 laporan	176.060.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	1 laporan	109.965.000	
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	12 laporan	309.650.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	12 laporan	252.825.000	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	816.349.200	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	736.842.200	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatanperumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	95%	220.809.600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatanperumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	95%	210.402.600	
1	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Penawasan	Inspektorat	Jumlah peserta sosialisasi SPIP	100 orang	124.686.000	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah peserta sosialisasi SPIP	100 orang	123.686.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP	1 dokumen	96.123.600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP	1 dokumen	86.716.600	
II	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	595.539.600	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	526.439.600	
1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 kegiatan	101.427.000	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 kegiatan	71.646.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	168.042.600	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	136.622.600	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	166.192.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	171.893.000	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	159.878.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	146.278.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat ,dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja.Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari.Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Sehingga Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat,meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prekursor Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Erangkas Pondsasi										Kategori	Monev/ Pengingat		
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Kategori	Monev/ Pengingat
						Semua	Majadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022	Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.01	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	100%	100%	15.214.76.549	9.533.620.320	22.694.443.341	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	85%	85%	115.108.700	95.731.300	92.014.100	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 01	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	31.751.000	31.751.000	24.886.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	2 dokumen	2 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 02	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	10.290.100	9.592.600	9.392.600	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 03	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	9.634.700	8.305.600	8.305.600	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 04	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	10.543.300	8.330.000	8.330.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 05	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	10.492.300	6.387.500	6.387.500	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 dokumen	1 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 06	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	10.491.300	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	5 dokumen	5 dokumen	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.01 07	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	1 laporan	1 laporan	31.375.000	31.375.000	31.375.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	1 laporan	1 laporan	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.02	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	100%	100%	6.414.544.149	4.401.134.320	7.235.993.441	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	100%	100%	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.02 01	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	61 orang	61 orang	6.366.340.549	4.384.707.300	7.249.567.061	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	61 orang	61 orang	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.02 02	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	0	0	8.240.000	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	0	0	INSPEKTORAT				
6 01 01 2.02 04	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN RESPONDENT DAERAH PROGRAM PERUMAH KAWASAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	0 dokumen	0 dokumen	3.365.000	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Mempertah Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	Daerah	0 dokumen	0 dokumen	INSPEKTORAT				

Kode	Usus/Bidang Usus/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode BRIKAD	Realisasi Capaian RPOD Tahun 2020	Praktisi Capaian Target RPOD Tahun 2021	Peta Indikator				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelembagaan	Prinsip	Target	Pagu Indikatif	Pemerintah Kabupaten Bontona Tahun 2023	Pemerintah Daerah Pengguna Anggaran			
						Target 2022		RPOD 2022											RPOD 2022 Perubahan	RPOD 2022 Perubahan	Daerah
						Semula	Mendapat	RPOD 2022	APRO 2022												
6 01 01 2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD	1 dokumen	1 dokumen	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen	40.000.000						
6 01 01 2.02	06	Pengalihan dan Penyajian Bahan Tanggapan Palmentasi	0 dokumen	0 dokumen	18.226.000	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	0 dokumen	30.000.000						
6 01 01 2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SPPD	0 laporan	0 laporan	5.692.200	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	0 laporan	30.000.000						
6 01 01 2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Rekrutasi Anggaran	0 laporan	0 laporan	3.500.000	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	0 laporan	15.000.000						
6 01 01 2.05	06	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	100%	100%	2.113.345.000	1.929.807.000	1.029.807.000	1.029.807.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	100%	2.100.000.000						
6 01 01 2.05	07	Pengadaan Pakaian Dinas Busera Akibat Kelangkaan	120 stel	120 stel	74.750.000	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	120 stel	29.750.000						
6 01 01 2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 orang	60 orang	1.190.000.000	616.000.000	616.000.000	616.000.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	60 orang	1.170.750.000						
6 01 01 2.05	10	Sosialisasi Pakarun Perunding-Undangan	100 orang	100 orang	272.675.000	243.745.000	243.745.000	243.745.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	100 orang	107.500.000						
6 01 01 2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunding-Undangan	60 orang	60 orang	580.921.000	168.062.000	168.062.000	168.062.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	60 orang	117.750.000						
6 01 01 2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	676.350.520	597.639.500	597.639.500	597.639.500	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	100%	1.100.000.000						
6 01 01 2.06	01	Penyediaan Korporasi Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis	13 jenis	40.785.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	13 jenis	27.100.000						
6 01 01 2.06	02	Penyediaan Resultan dan Perengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis	234.450.000	119.790.000	119.790.000	119.790.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7 jenis	115.000.000						
6 01 01 2.06	03	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga yang diadatkan	25 jenis	25 jenis	27.439.500	20.319.200	20.319.200	20.319.200	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	25 jenis	115.000.000						
6 01 01 2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diadatkan	5 paket	5 paket	70.693.000	60.112.300	60.112.300	60.112.300	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	5 paket	80.000.000						
6 01 01 2.06	05	Penyediaan Bagan Catatan dan Pengendalian	6 jenis	6 jenis	43.775.000	32.265.000	32.265.000	32.265.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	6 jenis	63.000.000						
6 01 01 2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perengkapan Perunding-Undangan	50 aksesoris	50 aksesoris	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	50 aksesoris	15.000.000						
6 01 01 2.06	07	Facilitasi Mungupan Temu Konjungsi Temu	200 orang	200 orang	77.900.000	59.150.000	59.150.000	59.150.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Kab. Lima Puluh Kota	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	200 orang	125.000.000						

Capaian Kinerja dan Strategi Pendanaan

Kode	Usaha/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode R/MD	Realisasi Capaian R/MD Tahun 2020	Praktisi Capaian Target R/MD Tahun 2021	Pagu Indikat				Lokasi	Sumber Dana	Maksimal	Daerah	Kelompok Sasaran	Pratama Rancangan Tahun 2023	Peringkat Daerah Penyandingan		
						Target 2022		Rencana Anggaran									RPO 2022 Pembelian	RPO 2022 Pembelian
						Semula	Mengadi	R/MD 2022	APMO 2022									
6 01 01 2.06 05	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMDP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMDP	100 laporan	100 laporan	100 laporan	200.314.000	217.314.000	223.256.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	Pagu Indikat	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.07	Pengadaan Bering Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	2.111.030.000	124.475.000	115.655.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	100%	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit	10 unit	845.700.000	-	-	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	10 unit	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dibudidayakan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	153.750.000	124.475.000	115.655.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	6 jenis	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Aulis Inspektorat	1 unit	1 unit	1 unit	1.032.400.000	-	-	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	1 unit	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	100%	100%	100%	248.995.000	216.390.000	176.590.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	100%	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08 01	Pemeliharaan Jasa Suret Menyurat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Suret Menyurat	300 lembar	300 lembar	300 lembar	6.640.000	5.000.000	5.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	300 lembar	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08 02	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	12 paket	12 paket	12 paket	63.750.000	63.750.000	63.750.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	12 paket	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08 04	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	120 meter	120 meter	120 meter	360.000.000	360.000.000	360.000.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	120 meter	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08 06	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	6 orang	6 orang	6 orang	174.565.000	107.640.000	107.640.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	6 orang	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.08 09	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	100%	100%	100%	307.020.000	240.080.000	240.080.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	100%	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.09 01	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	50 unit	45 unit	45 unit	300.570.000	186.190.000	186.190.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	50 unit	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.09 02	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	1 unit	1 unit	1 unit	74.400.000	37.200.000	37.200.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	1 unit	INSPEKTORAT			
6 01 01 2.09 03	Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	16.690.000	16.690.000	16.690.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	1 kegiatan	INSPEKTORAT			
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERGAJARAN	Persentase OTD yang memiliki nilai evaluasi ACP BS di wilayah I, II, III dan IV	83%	83%	83%	2.315.446.000	2.171.150.000	2.502.545.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	83%	INSPEKTORAT			
6 01 02 01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tidak adanya pengawasan internal	60%	60%	60%	1.813.716.000	1.813.195.000	2.140.155.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	60%	INSPEKTORAT			
6 01 02 01 01	Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	152 laporan	152 laporan	152 laporan	318.100.000	590.500.000	664.110.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abdiast Umum	Mempertuak Stabilitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab.Lima Puluh Kota	152 laporan	INSPEKTORAT			

Capaian Kinerja dan Mengevaluasi Pendanaan

Kode	Urusan/Bidang/Usahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2020	Prestasi Capaian Target RPJMD Tahun 2021	Target 2022			Page Indikator		Lokasi	Sumber Dana	Profilas		Kelempa/Instansi	Prestasi/Target/Target	Page Indikator
						Semula	Menjadi	RPJMD 2022	RPJMD 2022	Nasional			Daerah				
														45 laporan			
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	45 laporan	340.770.000	RPJMD 2022	504.550.000	504.550.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	45 laporan	504.550.000	INSPEKTORAT	504.550.000	
6 01 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	43 laporan 2 laporan	415.790.000	138.370.000	138.370.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	63 laporan 2 laporan	534.623.000	INSPEKTORAT	534.623.000		
6 01 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 laporan	26.640.000	24.850.000	24.850.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan	33.000.000	INSPEKTORAT	33.000.000		
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum	20 laporan	234.025.000	315.600.000	317.300.000	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	20 laporan	400.000.000	INSPEKTORAT	400.000.000		
6 01 02 2.01 06	Kepuasan Pengawasan Internal	Jumlah Kepuasan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kegiatan	94.487.000	-	-	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	1.500.000.000	INSPEKTORAT	1.500.000.000		
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPR RI dan Tidak Lanjut Pemertisan APJ	Tidak lanjut rekomendasi hasil pemertisan eksternal Tidak lanjut rekomendasi hasil pemertisan internal	80%	418.869.000	274.815.000	274.815.000	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	1.500.000.000	INSPEKTORAT	1.500.000.000		
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terfaksinya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	485.733.000	339.835.000	352.790.000	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	80%	4.000.000.000	INSPEKTORAT	4.000.000.000		
6 01 02 2.02 01	Peningkatan Pemertisan Laporan Negara/ Daerah	Jumlah laporan yang selesai Kelengkapan Negara/ Daerah	1 laporan	376.000.000	309.363.000	309.363.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 laporan	300.000.000	INSPEKTORAT	300.000.000		
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	12 laporan	309.650.000	229.870.000	233.025.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	12 laporan	400.000.000	INSPEKTORAT	400.000.000		
6 01 03	PROGRAM PENUNJANG KEBUAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kepabilitas APJ	level 3	810.349.200	736.942.200	735.842.200	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	level 3	920.000.000	INSPEKTORAT	920.000.000		
6 01 03 2.01	Perencanaan Kebijakan, Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase terfaksinya kegiatan perencanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	95%	220.808.000	210.402.600	210.402.600	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	95%	750.000.000	INSPEKTORAT	750.000.000		
6 01 03 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi SPJ di Bidang Pengawasan	100 orang	324.668.000	323.686.000	323.686.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	100 orang	1.500.000.000	INSPEKTORAT	1.500.000.000		
6 01 03 2.01 02	Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APJ	1 dokumen	96.112.600	86.716.600	86.716.600	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	1.500.000.000	INSPEKTORAT	1.500.000.000		
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terfaksinya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	589.339.600	576.439.600	576.439.600	Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	95%	6.760.000.000	INSPEKTORAT	6.760.000.000		
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi untaun Pemerintah Daerah	Jumlah Peranaktif Daerah yang dididukan Pendampingan dan Asistensi Untaun Pemerintah Daerah	1 kegiatan	301.427.000	71.644.000	71.644.000	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	315.000.000	INSPEKTORAT	315.000.000		
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Peranaktif Daerah yang dididukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	188.044.600	136.622.600	136.622.600	Kab.Lima Puluh Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihubungam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kegiatan	3.700.000.000	INSPEKTORAT	3.700.000.000		

Kode	Uraian/Bidang Urusan/ Program/Kelemb/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPJMD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelempok Sawara	Princian Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Peningkat/Gesab
						Target 2022			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Profilas			Tipe	Page Indikatif	
						Semula	Menjadi	RUPD 2022	RPJMD 2022	RPJMD 2023	Nasional			Daerah					
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembangunan Organisasi Pendidikan, Asesori dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembangunan Organisasi Jumlah Peringkat Daerah yang diakreditasi dan Verifikasi Pencapaian Integritas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	166.159.000	171.850.000	171.850.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abadi Umum	Mempertuak Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	1 kegiatan	133.000.000	INSPEKTORAT				
6 01 03 2.02 04	Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Peringkat Daerah yang diakreditasi dan Verifikasi Pencapaian Integritas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	159.874.000	146.278.000	146.278.000	Kab.Lima Puluh Kota semua Kecamatan semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Abadi Umum	Mempertuak Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	1 kegiatan	180.000.000	INSPEKTORAT				

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/ audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009